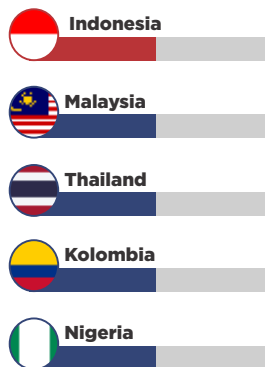
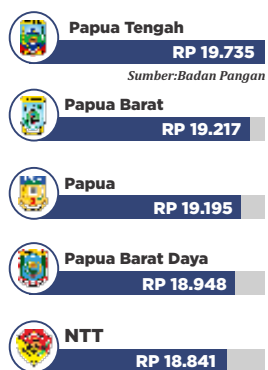


**5 Negara
Produsen Minyak
Kelapa Sawit Terbesar
(2023/2024)**



Sumber: Departemen Pertanian Amerika Serikat

**5 Provinsi dengan
Harga MinyakKita
Tertinggi (8/3/2025)**



EDISI SENIN, 10 MARET 2025

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02 GOVERNMENTTODAY
Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Mulai 12 Juli

05 NUSANTARA
Masuk Kawasan Hutan Produksi, 4 Vila di Puncak Disegel

10 LISTSTYLE
Tips Atasi Jerawat Hormonal Secara Alami

PROFIL 3 PRODUSEN MINYAKITA DIDUGA CURANGI VOLUME

**PT Artha
Eka Global Asia**

Dari situsnya, PT Artha Eka Global Asia (AEGA) adalah perusahaan bidang perdagangan domestik, perdagangan internasional, properti, konstruksi, pergudangan dan logistik dengan bertujuan menjadi pemimpin pasar dalam produk pangan serta produk konsumen. Sebagai produsen MinyakKita ini telah terdaftar merek di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU - 0072532.AH.01.Tahun 2024.

**Koperasi Produsen UMKM
Koperasi Terpadu Nusantara**

Informasi mengenai Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara dapat ditemukan di website dewasera.com. Di situs ini ditemukan bahwa koperasi ini memiliki layanan bisnis pengemasan minyakkita dan minyak premium Merk KTN. Kantor Koperasi Produsen UMKM Terpadu Nusantara berada di Semarang, Jawa Tengah yang dipimpin oleh Drs Mughthanim. Koperasi ini berdiri sesuai dengan SK KEMENKUMHAM NO. AHU-0006330.AH.01.28.TAHUN 2022.

**PT Tunasagro
Indolestari**

PT Tunasagro Indolestari adalah pabrik minyak goreng kemasan Merek Fetta, Bulan Sabit & Naga Mas. Berdasarkan data indonetwork, perusahaan ini berada di Mekar Jaya Industrial Estate, Tangerang, Banten.

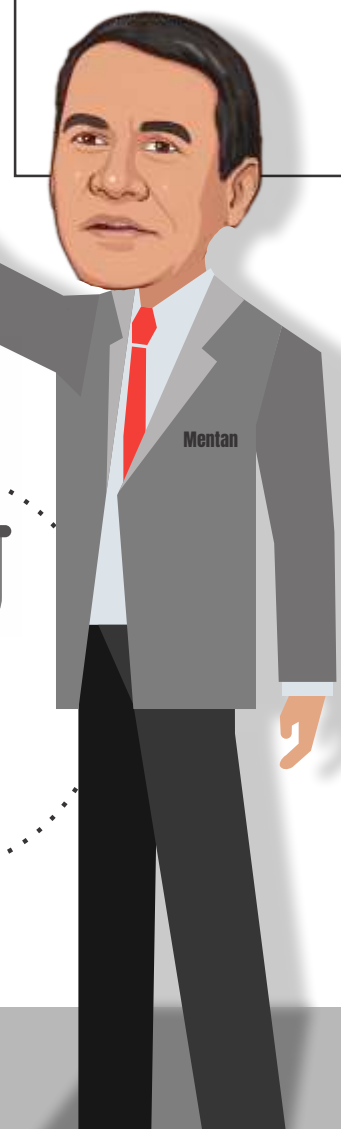
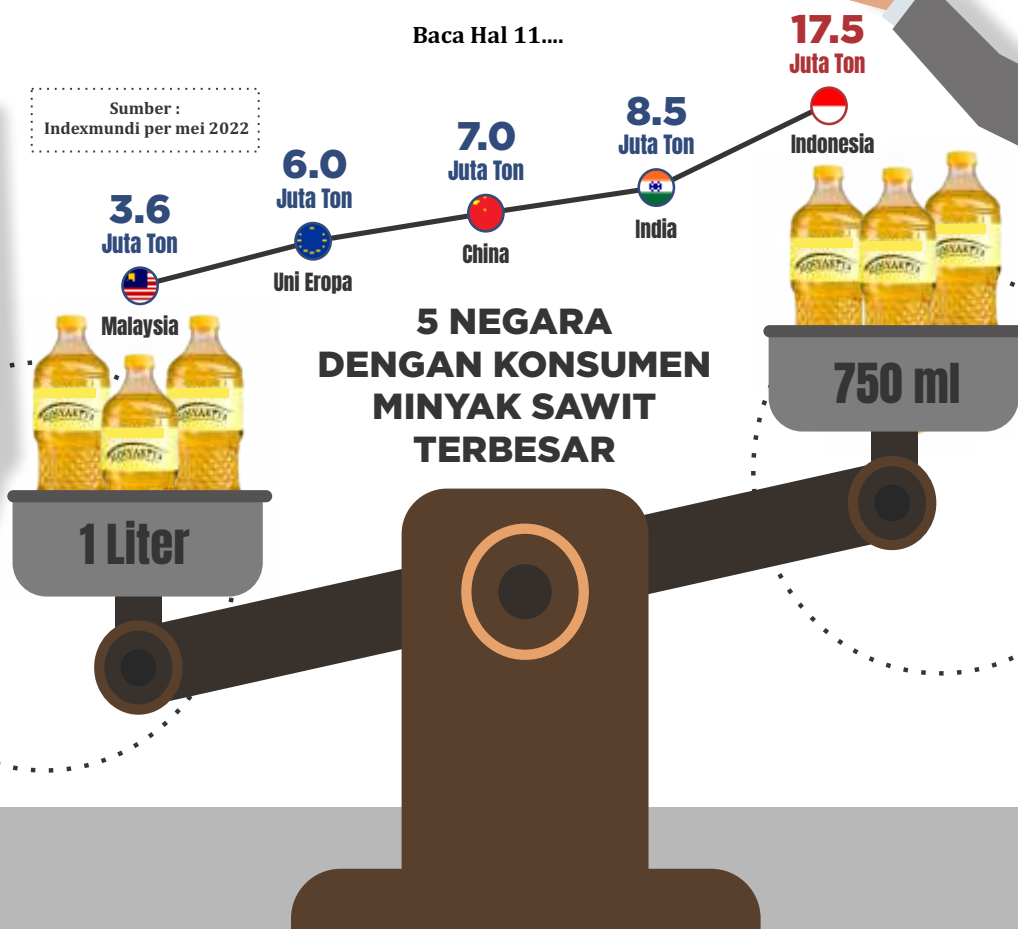
TIPU-TIPU VOLUME MINYAKITA

1 Liter Isi 750 Mililiter: Dibantah Mendag, Ditemukan Mentan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng (migor) dengan merek MinyakKita dikemas di bawah ketentuan yang seharusnya. Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, migor yang semestinya berisi 1 liter, saat dicek ulang ternyata hanya 750-800 mililiter. Mentan Amran pun telah melaporkan tiga produsen MinyakKita diduga melakukan tipu-tipu volume tersebut ke Satgas Tugas Pangan dan Bareskrim Polri. Hasilnya, kepolisian telah bertindak dan melakukan penyitaan. Pertama, MinyakKita produksi PT Artha Eka Global Asia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Kedua, MinyakKita produksi koperasi produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah. Terakhir, MinyakKita kemasan pouch ukuran 2 liter produksi PT Tunas Agro Indolestari, Tangerang, Banten. Proses penyelidikan dan penyidikan atas temuan tersebut dikatakan sedang berjalan. Padahal, sebelumnya saat warganet menunggah video terkait perbedaan volume tersebut, dengan yakin Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menepisnya. Mendag Budi menyatakan sudah tidak ada MinyakKita yang isinya berada di bawah ketentuan 1 liter. Dalam hitungan ekonom, ketidaksesuaian volume MinyakKita memberikan keuntungan besar bagi pemburu rente hingga Rp731 miliar setiap bulan. Siapa yang jadi korban? Lagi-lagi rakyat.

Baca Hal 11....

Sumber:
Indexmundi per mei 2022



Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Mulai 12 Juli

JAKARTA - Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto bakal diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.

Dalam penjelasannya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa rencana untuk membentuk 70 ribu koperasi pada tahun ini akan dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu membangun koperasi baru, meremajakan koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi yang sudah ada. Pendekatan ini akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.

Mengenai modal awal koperasi, Budi Arie menjelaskan bahwa pembiayaan akan dilakukan melalui berbagai alternatif, seperti dana desa, APBN, APBD, dan pinjaman dari bank-bank Hibnara.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di setiap desa. Selama proses ini, musyawarah desa akan diadakan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pendirian koperasi sebanyak mungkin.

"Kemenkop juga nantinya memberikan modul-modul pelatihan dan lain-lain termasuk penyusunan pengurus koperasi," ujar Ferry.

Ferry menambahkan bahwa pengurus koperasi akan diberikan pelatihan modern untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola koperasi secara lebih efektif dan efisien. Pelatihan ini akan mencakup pengetahuan dan keterampilan mengenai proses bisnis serta model bisnis, sehingga Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi dengan berkelanjutan, bergerak lebih cepat, dan mencapai tujuan secara optimal.

Pemerintah gencar dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan membantu pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui penyerapan produk-produk pertanian, perikanan, dan hasil ternak yang ada di daerah.

Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan dapat membuka dan mengelola berbagai fasilitas seperti gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam koperasi, klinik desa, fasilitas penyimpanan atau cold storage, serta distribusi logistik. Selain itu, koperasi ini juga dibentuk untuk menjadi penyalur bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).



Disiapkan Rp 5 M/Koperasi

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyiapkan investasi sebesar Rp3 miliar-5 miliar untuk setiap Koperasi Desa Merah Putih.

Selain dukungan finansial, setiap koperasi akan dilengkapi dengan fasilitas multifungsi, seperti kantor koperasi, outlet penjualan sembako, outlet simpan pinjam untuk modal kerja, klinik dan apotek, gudang untuk sarana produksi dan oftaker, serta truk untuk mendukung mobilisasi logistik desa.

"Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi untuk rakyat. Pemerintah mempersiapkan investasi sebesar Rp 3-5 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih," kata Panel, dalam keterangan resmi, Minggu (9/3/2025).

Panel menjelaskan bahwa pendanaan untuk koperasi tersebut bisa berasal dari dana desa, namun ia menegaskan bahwa dana desa sudah dialokasikan untuk berbagai pembangunan desa lainnya. Oleh karena itu, pemerintah sedang mencari skema pembiayaan tambahan agar Koperasi Desa Merah Putih

mendapatkan dukungan dari sektor lain.

"Pemerintah sedang menggalang kolaborasi pembiayaan dan terus mencari model bisnis yang terbaik bagi operasional Kopdes Merah Putih," ujarnya.

Lebih lanjut, Panel menjelaskan bahwa koperasi ini merupakan bagian dari strategi besar untuk membangkitkan ekonomi nasional. Ia meyakini program ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.

"Rencana Presiden Prabowo Subianto yang sangat revolusioner di bidang koperasi dan ekonomi rakyat tersebut akan bertransformasi menjadi gerakan masyarakat desa," ungkap Panel.

Panel juga menambahkan bahwa banyak warga desa yang menyambut positif program Koperasi Desa Merah Putih.

"Warga desa dengan kesadaran yang sama meyakini bahwa Kopdes Merah Putih adalah jalan yang benar untuk membabaskan diri dari kemiskinan," imbuh dia.

Terpisah, Anggota DPR RI Riyono Anggota DPR RI Riyono memberikan apresiasi terhadap rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk mendirikan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan

Apa itu Koperasi Desa Merah Putih?

- Badan usaha berbentuk koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Diharapkan bisa mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.
- Terdapat sekitar 64.000 kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi.
- Koperasi Desa Merah Putih akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.
- Keberadaan koperasi desa juga akan menjadi agregator untuk mendorong peningkatan harga produk pertanian dari desa sekaligus menjadi stabilisator bagi inflasi.
- Selain memperkuat ekonomi desa, koperasi ini diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang antara produsen dan konsumen sehingga harganya lebih murah.

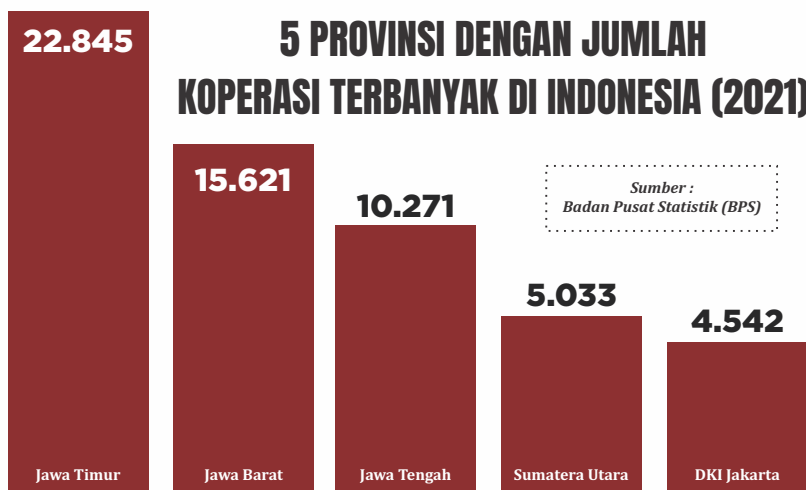
untuk mendorong perekonomian desa dan memberikan manfaat bagi para petani.

"Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah bisnis dan pelayanan dengan modal awal Rp3-5 miliar secara teori bagus dan bisa menggerakkan ekonomi pedesaan, petani akan diuntungkan," katanya dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 5 Maret 2025.

Riyono menambahkan bahwa koperasi merupakan pilar utama ekonomi pedesaan, lahir dari masyarakat kecil dengan tujuan yang mulia untuk kesejahteraan bersama. Dalam penerapan koperasi ini, ia menekankan bahwa petani, nelayan, dan pemuda desa yang memiliki kompetensi serta integritas perlu berkontribusi untuk menjadi pilar kebangkitan ekonomi desa.

Riyono juga menyatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto harus dipersiapkan dengan matang, karena visi beliau yang mendukung ekonomi desa sesuai dengan Astacita membangun dari desa.

"Kami di DPR meminta kepada para menteri untuk menerjemahkan dan menyiapkan dengan baik semua langkah teknis dan operasionalnya. Kunci kemajuan koperasi adalah SDM yang andal, ajak pemuda tani dan nelayan serta ibu-ibu untuk membentuk koperasi ini," ujar Riyono. (wid, rls, ant/dya)



DPR Tuding Pemerintah Salah Tafsir: Kami Ingin Pengangkatan CPNS Dipercepat

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan lebih rinci isi rapat pengambilan keputusan tentang perubahan jadwal pelantikan Calon Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

Arse menjelaskan, dalam rapat Komisi II berpesan untuk melakukan percepatan pengurusan administrasi calon PNS dengan menetapkan batas akhir pelantikan pada Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk PPPK.

"Kita tidak meminta dimulainya pengangkatan tapi sebenarnya semangat kita itu melakukan percepatan, ya penataan dan penyelesaian, dan itu batas akhir itu ya Oktober dan Maret itu batas akhir, tidak boleh lewat itu," kata Arse saat dihubungi, Minggu (9/2/2025).

Dalam poin kesepakatan DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN untuk menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan PPPK di bulan Maret tahun 2026.

"Untuk kita begitu sebenarnya. Tapi kelihatannya pemerintah memahami lain," kata politisi Golkar itu.

Meski begitu, Arse menegaskan bahwa perubahan jadwal ini tidak mengubah status penerimaan calon pegawai.

"Pasti diterimanya (sebagai ASN), tinggal pengangkatannya saja kan," katanya.

"Nah kita ada perbedaan nih sama pemerintah KemenPAN-RB sama BKN dalam hal itu soal pengangkatan itu. Kalau kita memahaminya pengangkatan itu harus sudah dimulai dan batas akhirnya Oktober-Maret," jelasnya.

Saat ditanya apakah perbedaan tafsir ini akan berujung pada rapat lanjutan antara Komisi II dan KemenPAN-RB juga BKN terkait jadwal pelantikan, Arse mengatakan pihaknya harus mengkaji terlebih dahulu.

"Nanti kita lihat kita kan perlu rapat lagi ya, rapat internal dulu dengan pimpinan, dengan Kapoksi, dengan semua, kalau dari hasil rapat itu kita harus panggil, ya kita akan panggil," pungkasnya.

Sekadar informasi, polemik pengangkatan Calon Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) terus bergulir. Sebagian besar dari mereka yang sudah lulus di tahap akhir mengeluh karena terjadi penundaan



Komisi II DPR RI saat melakukan Rapat Kerja dengan Menpan RB, Rini Widyantini. (Dok)

pengangkatan alias tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Untuk diketahui, pengangkatan CPNS 2024 yang semulanya di Bulan Maret 2025 (usul penetapan NIP) menjadi mulai diangkat dan melaksanakan tugas pada 1 Oktober 2025 secara serentak. Sedangkan, untuk pengangkatan PPPK Tahap yang semulanya di Bulan Juli 2025 (usul penetapan NIP diundur menjadi 1 Maret 2026 secara serentak. Hal itu sebagaimana ditetapkan KemenPAN-RB melalui Surat Edaran (SE) bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025.

BKN Pastikan Gaji Tetap Dibayar

Terpisah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan usul penetapan NIP CASN 2024 akan selesai paling lambat 30 Juni 2025 bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 30 November 2025 bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Proses penetapan Nomor Induk atau NIP bagi pelamar seleksi CASN T.A 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan penyesuaian jadwal yang ditetapkan melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tanggal 07 Maret 2025.

Kepala BKN Zudan mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai Non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024.

"BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan penyesuaian jadwal

ini," kata Zudan dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

Proses penetapan CASN telah disampaikan kepada seluruh instansi melalui Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 tanggal 8 Maret 2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon ASN Kebutuhan Tahun 2024.

Melalui surat Kepala BKN tersebut diatur bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi T.A 2024 yang belum ditetapkan Nomor Induknya akan tetap dilanjutkan hingga keputusan pengangkatan diterbitkan.

Penyesuaian jadwal ini dilakukan karena banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CPNS dan/atau PPPK.

Lebih lanjut, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS Terhitung Mulai Tanggal atau TMT 1 Oktober 2025 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) akan diterbitkan pada tanggal yang sama. Selanjutnya, penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 01 September 2025.

Sementara itu, bagi peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan (formasi) akan diangkat menjadi PPPK TMT 01 Maret 2026 dan keputusan pengangkatan PPPK paling lambat tanggal 01 Februari 2026.

Selain itu, Pertimbangan Teknis atau Pertek Penetapan Nomor Induk CPNS yang telah diterbitkan juga akan disesuaikan menjadi TMT 01 Oktober 2025. Sementara untuk Pertek Penetapan Nomor Induk PPPK menjadi TMT 01 Maret 2026.

Instansi yang telah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS dengan TMT selain 01 Oktober 2025 dan PPPK dengan TMT selain 01 Maret

5 Poin Kesepakatan Komisi II DPR RI dan MenPAN-RB

1. Dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita, Komisi II meminta Kementerian PANRB melakukan penyesuaian formasi, jabatan, dan penempatan dalam seleksi CPNS dan PPPK berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045.

2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB memastikan proses seleksi CPNS dan PPPK yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk melarung dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025 - 2030 yang melakukan pengangkatan Tenaga Non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.

4. Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024 Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan PPPK di bulan Maret tahun 2026.

5. Penataan tenaga Non ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya

2026, diminta untuk menyesuaikan berdasarkan Pertimbangan Teknis BKN. Adapun bagi pelamar PPPK yang pada tanggal 01 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, akan tetap akan diangkat sebagai PPPK dengan masa perjanjian kerja selama satu tahun.

Di media sosial X, yang dulu dikenal Twitter, bermunculan tagar #SaveCASN2024 sejak Kamis, 6 Maret 2025. Para pengguna membagikan gambar pita putih dan menyampaikan keberatan atas keputusan pemerintah menunda pengangkatan CASN 2024. (din, ist, rls, ant/dya)

SHGB di Laut Sidoarjo Dipastikan Tak Diperpanjang

SURABAYA, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Laut Sidoarjo tidak diperpanjang.

"SHGB yang di Sidoarjo tidak akan diperpanjang," katanya kepada wartawan usai menggelar rapat tertutup dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Graha di Surabaya, Minggu (9/3/2024) malam.

Pihaknya mengaku sudah melakukan peninjauan pada obyek SHGB di perairan Kecamatan Sedati Sidoarjo tersebut. "Kami sudah melakukan peninjauan dan analisis. Hasilnya, memang SHGB yang terbit itu muncul di bekas tambak. Namun, saat ini fungsinya sudah menjadi laut," terangnya.

SHGB di Perairan Sedati Sidoarjo, menurut Nusron, akan habis masa berlakunya pada Februari 2026 tahun depan. Proses pembatalan sertifikat itu hanya dapat dilakukan oleh pejabat



Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid saat membahas kebijakan tata ruang dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Graha di Surabaya, Minggu (9/3/2025).

pembuat keputusan tata usaha negara, dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun syaratnya, jika surat itu jangka waktunya di atas lima tahun, butuh proses persidangan. "Supaya tidak harus menunggu pengadilan, tahun depan SHGB habis tidak kami perpanjang," ucap Nusron.

Fakta HGB itu sebelumnya diungkap oleh Akademisi dari

Universitas Airlangga (Unair) Thanthowy, yang awalnya menemukan HGB di laut Sidoarjo melalui aplikasi Bhumi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

HGB itu dimiliki di tiga titik koordinat dengan luas kurang lebih 219,32 hektar, 285,17 hektar, dan 152,37 hektar. Area seluas 656 hektar

di laut Sidoarjo memiliki HGB yang terbit sejak era Presiden ke-2 Soeharto. HGB ini keluar pada tahun 1996. Kemudian yang nomor 2 juga tanggal 2 Agustus, yang nomor 2 keluar tanggal 15 Agustus 1996, dan yang nomor 3 keluar pada 26 Oktober tahun 1999. HGB berupa dua bidang seluas 285,16 hektar dan 219,31 hektar dimiliki oleh PT SIP. Sementara PT SC memiliki lahan seluas 152,36 hektar.

Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim melakukan penyelidikan atas temuan SHGB di laut Sidoarjo. Bahkan saat ini prosesnya sudah naik ke tahap penyidikan.

Penyidik disebut sudah memeriksa 14 saksi termasuk di dalamnya perwakilan dua perusahaan yakni dari PT SIP dan PT SC sebagai pemilik SHGB.

Polisi mengendus dugaan pelanggaran hukum atas terbitnya surat keterangan riwayat tanah dari kepala desa pada 1996 untuk tiga HGB tersebut. (wid, rls ist/dya)

Sebelumnya Dilarang, Kini BGN Restui Program Sarapan Gratis Jakarta



Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya kini mempersilakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya untuk melaksanakan program sarapan gratis.

Dadan mengatakan, sarapan gratis akan lebih bermanfaat jika menasar siswa SMP dan SMA. "Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, Badan Gizi Nasional pasti tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta jika ingin

melanjutkan program sarapan gratis. Dia mengklaim tidak ada masalah antara Badan Gizi Nasional dengan program Pemprov Jakarta itu.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Diganti Renovasi Kantin

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis. Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta," kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah

pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu. Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

"Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis," kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat. Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat. Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

"Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," kata dia. (wid rls, ist, kum/dya)

Masuk Kawasan Hutan Produksi, 4 Vila di Puncak Disegel

JAKARTA-Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN me-nertibkan sejumlah vila di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Minggu (9/3/2025). Penyegelan dilakukan karena vila itu berdiri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan kawasan hutan produksi.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan pemerintah akan me-review dan menertibkan penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung.

"Hari ini kami melakukannya di Vila Forest Hill ini adalah hulu DAS dari Ciliwung dan di sini terdapat 7 vila, ini termasuk kawasan hutan produksi," kata Rudianto.

Rudianto menyebut, pihaknya telah mengidentifikasi ada 15 titik vila lainnya yang akan dilakukan penertiban dan dipasang plang penyegelan.

Vila Forest Hill berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam penyegelan itu, Kementerian Kehutanan menggunakan UUD Nomor 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat 3.

UUD itu berbunyi, dilarang mengerjakan, menduduki di dalam kawasan hutan."Kalau kita kasih Pasal 78 ayat 3 huruf a nya itu kalau dia tidak punya izin, tidak memiliki hak, tidak memiliki legalitas, dia 10 tahun dan denda Rp 5 miliar itu pengenaan kita," kata dia.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Yazid Nurhuda, menjelaskan pihaknya akan mengevaluasi dan melihat kembali bangunan maupun kegiatan-kegiatan di hulu DAS Ciliwung.

"Hal ini dalam rangka untuk menyelamatkan hulu DAS Sungai Ciliwung sebagai resapan air Sehingga diharapkan ini bisa berjalan sesuai dengan fungsinya," ucapnya.

"Hari ini dari tadi pagi kita sudah melakukan 4 lokasi pemasangan papan larangan, yaitu yang pertama di vila Forest Hill, kemudian Vila Seaford Afrika, Vila Cemara, dan Vila Vinus," tutur dia.

Update Longsor Sukabumi: 5 Orang Meninggal

Sementara itu, BNPB mencatat sebanyak 5 orang yang sempat



Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN menertibkan sejumlah vila di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Minggu (9/3/2025).(Dok.ist)

dinyatakan hilang saat banjir dan longsor pada Kamis (6/3) dinyatakan meninggal dan telah ditemukan, Minggu (9/3). Sementara itu, 4 orang

lainnya masih belum ditemukan.

"5 warga meninggal dan 4 warga dinyatakan hilang, sampai saat ini masih dalam pencarian tim SAR," kata

Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Abdul menuturkan, tercatat sebanyak 12 desa di 9 kecamatan terdampak banjir dan 30 desa di 22 kecamatan terdampak tanah longsor.

Total sebanyak 1.424 KK atau 4.500 warga terdampak dan 83 KK atau 246 warga di antaranya dilaporkan mengungsi serta enam warga di antaranya di laporkan luka-luka.

Selain itu, 150 unit rumah rusak ringan, 110 unit rumah rusak sedang, 95 unit rumah rusak berat, 3 unit jembatan rusak sedang, 3 unit jembatan rusak berat, 1 sarana Kesehatan RS, dan 27 titik jalan terdampak serta 16 titik jembatan lainnya juga ikut terdampak.(din, rls, ant/dya)

BMKG Peringatkan Risiko Banjir Susulan

BANJIR masih terus menghantui wilayah RI akibat cuaca ekstrem yang ditandai dengan tingginya curah hujan dan angin kencang.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan ada risiko banjir susulan di sejumlah wilayah Jabodetabek pada 15-20 Maret 2025.

"Ini ada update terbaru kondisi 10 hari kedua dan 10 hari ketiga di bulan Maret. Update terbaru puncaknya ada di 10 hari kedua Maret sekitar sampai tanggal 21 Maret," kata Dwikorita dalam rapat koordinasi dengan Menko PMK, BNPB dan Basarnas, serta BPBD Jawa Barat, Banten dan Bogor, dikutip Minggu (9/3/2025).

Diketahui, beberapa wilayah Jabodetabek telah terendam banjir sejak Selasa (4/3/2025) lalu, dan air kembali tinggi pada Sabtu (8/3/2025) kemarin.

"Puncaknya tanggal 20 Maret. Range bahaya tanggal 15-20 Maret. Itu bisa jadi waspada. Diimbau untuk mengurangi aktivitas warga di tanggal tersebut," Dwikorita menambahkan.

Sebelumnya, Dwikorita menyebut BMKG memprediksi musim hujan akan berakhir di akhir Maret 2025. Pada April 2025, wilayah RI mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau.

Kendati demikian, beberapa daerah dengan pola hujan musonal kemungkinan masih akan mengalami hujan hingga April atau Mei 2025.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG sudah berupaya mencari solusi untuk mengurangi risiko bencana akibat curah hujan tinggi. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), yang bertujuan untuk mengendalikan curah hujan guna meminimalkan dampak bencana.

Teknologi ini dilakukan dengan menyebarkan bahan tertentu, seperti natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO), menggunakan pesawat khusus.

Pelaksanaan OMC dilakukan sejak 4 hingga 8 Maret 2025 di beberapa wilayah strategis. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan intensitas hujan, terutama di daerah yang berisiko tinggi mengalami banjir dan longsor.

Mekanisme pelaksanaan OMC ini diawali dengan penetapan status tanggap darurat oleh daerah dan permohonan untuk melaksanakan OMC dari pimpinan daerah kepada BNPB.

Selanjutnya akan diaktivasi pos pelaksanaan OMC di bandara terdekat yang diisi oleh personil BNPB, personil BMKG yang memberikan analisis mengenai situasi cuaca dan target awan untuk

disemai garam.

BNPB akan berikutnya akan bekerjasama dengan pihak penyedia pesawat operasional untuk menjalankan OMC, dimana hasil penyemaian garam akan dilakukan setiap hari.

Sebagai langkah lanjutan, pada Sabtu (8/3), BNPB kembali melakukan operasi OMC untuk mendukung penanganan darurat bencana di Provinsi Jawa Barat. Dengan delapan sorti penerbangan, operasi ini menargetkan wilayah Jawa bagian barat dengan ketinggian operasional antara 8.000 hingga 11.000 kaki.

Penerbangan pertama dimulai pukul 03.00 WIB dan sorti terakhir dijadwalkan berakhir pada pukul 22.30 WIB, menyesuaikan dengan kondisi atmosfer dan kemunculan awan yang memungkinkan intervensi.

Hasil dari operasi ini semakin mempertegas efektivitas teknologi modifikasi cuaca dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana serta menjaga keseimbangan lingkungan. BNPB akan terus berkomitmen untuk menerapkan berbagai strategi mitigasi guna melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrem dan potensi bencana yang menyertainya.(wid, rls, ist/dya)

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif, Pekab Malang Siapkan Rp 50 M dari APBD 2026

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana mengelola sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif. Anggaran senilai Rp 50 miliar bakal dialokasikan dari APBD 2026.

Selain bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah di tiga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Bupati Malang, Sanusi, mengatakan langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jadi nanti anggarannya dibuat pengadaan alat pengolah sampah menjadi RDF. Sudah ada tiga tempat dari hasil survei, yakni TPA Talangagung di Kepanjen, TPA Paras di Poncokusumo, dan TPA Randuagung di Singosari," ujar Sanusi, Minggu (9/3/2025).

Sanusi menambahkan, pengadaan alat tersebut diproyeksikan mampu mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomi, dengan satu alat dapat mengolah sampah hingga 40 ton per hari.

Lebih lanjut, Sanusi menyampaikan pengadaan alat RDF ini

merupakan terobosan Pemkab Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang semakin meningkat. Dengan adanya sistem RDF, diharapkan tidak ada lagi tumpukan sampah yang menggunung di TPA.

"Targetnya, nantinya di Tempat Pemrosesan Akhir sudah tidak ada lagi tumpukan-tumpukan sampah. Sampah yang masuk akan langsung diolah menjadi RDF," kata Sanusi.

Bupati Malang dua periode ini juga menjelaskan, RDF yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah tersebut akan dijual ke industri yang membutuhkan bahan bakar alternatif untuk pembakaran. Hal ini diyakini akan berdampak positif terhadap PAD Kabupaten Malang.

"Kalau RDF ini sudah diproduksi secara maksimal, maka bisa menjadi sumber PAD baru bagi Kabupaten Malang. RDF bisa dijual ke pabrik-pabrik yang memerlukan bahan bakar untuk proses pembakaran," jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten

Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, menambahkan kajian terkait implementasi sistem RDF ini masih terus dilakukan di sepanjang tahun 2025.

Pihaknya berupaya memastikan agar seluruh aspek teknis dan regulasi bisa disiapkan dengan matang sebelum proyek ini berjalan penuh pada 2026.

Menurutnya, Kabupaten Malang saat ini menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah per hari. Dengan volume sebesar itu, sistem pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar persoalan sampah dapat ditangani secara komprehensif.

"Pengolahan sampah menjadi RDF ini bukan hanya solusi mengurangi



Ilustrasi penyelenggaraan perparkiran Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

volume sampah, tetapi juga menjadi inovasi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan metode landfill atau hanya menumpuk sampah di TPA," katanya. Santi/Dya)

Dishub Kota Malang Usul Ranperda soal Imbalan Jasa Jukir dan Sanksi Pelanggaran



Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Salah satu poin utamanya adalah pengaturan imbalan jasa bagi juru parkir (jukir) serta penenaan sanksi pelanggaran. Diketahui, selama

ini hal itu belum ada regulasinya.

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan perubahan ini bertujuan untuk memperjelas sistem penyelenggaraan parkir di Kota Malang. "Ini adalah Ranperda Penyelenggaraan Perparkiran. Tujuan utamanya adalah meningkatkan layanan agar parkir lebih tertata, aman, dan nyaman," ujar Widjaja, Minggu (9/3/2025).

Menurutnya, Ranperda ini juga mengatur skema bagi hasil bagi juru parkir

yang bertugas di lokasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Skema pembagian tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang.

"Kami mengusulkan skema sebagaimana yang diterapkan di

daerah lain, yaitu minimal 70 banding 30 persen. Bisa juga 60 banding 40 persen, tergantung kesepakatan nanti dan pembahasan pansus," tambahnya.

Selain imbalan jasa bagi jukir, pria yang akrab dengan sapaan Jaya ini, juga menegaskan adanya pemberian sanksi bagi pelanggar aturan parkir, baik pengguna kendaraan maupun juru parkir. Salah satu poin penting yang diatur yakni denda bagi kendaraan yang parkir di tempat terlarang.

"Misalnya parkir di tikungan, jembatan, atau area yang memang dilarang, akan dikenakan denda. Usulan kami, denda itu sebesar Rp 500 ribu per hari untuk kendaraan roda empat dan Rp 100 ribu untuk roda dua," jelas Widjaja.

Namun, dirinya menekankan, besaran denda tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses legislasi bersama DPRD.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita, menegaskan pembahasan Ranperda ini masih dalam tahap awal. Dalam rapat paripurna penyampaian

pandangan umum fraksi, dewan menerima berbagai masukan terkait isi regulasi yang diusulkan.

"Ini adalah penyampaian aspirasi dari kita semua terkait Ranperda yang akan kita garap bersama. Muatannya seperti apa, idealnya bagaimana, sudah disampaikan oleh teman-teman," ungkap Amithya.

Mia, sapaannya, juga menyampaikan DPRD Kota Malang masih akan melakukan beberapa tahapan dalam pembahasan Ranperda ini, termasuk uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

"Kami akan mendalami kembali substansi Ranperda ini melalui uji publik, agar nantinya aturan yang dihasilkan bisa benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan," tambahnya.

Mia berharap Ranperda yang nantinya disahkan tidak memerlukan banyak revisi atau evaluasi di kemudian hari. "Harapannya, regulasi ini bisa berjalan efektif tanpa perlu banyak revisi, dan kita juga akan mempertimbangkan kearifan lokal jika memang diperlukan," tegasnya. (Santi/Dya)

Ribuan Orang Unjuk Rasa di Seoul, Protes Bebasnya Yoon

SEOUL- Puluhan ribu orang diperkirakan berkumpul di Seoul, Korea Selatan, pada Minggu (9/3/2025) untuk menggelar aksi mendukung atau menentang Presiden Yoon Suk Yeol, sehari setelah pembebasannya yang mengejutkan dari tahanan.

Gereja Sarang Jeil, yang dipimpin oleh pendeta aktivis konservatif Jeon Kwang-hoon, mengadakan kebaktian Minggu di luar ruangan dekat kediaman presiden di pusat Seoul. Menurut perkiraan tidak resmi kepolisian, sekitar 4.500 orang telah berkumpul hingga tengah hari.

"Dengan pembebasan Presiden Yoon, sidang pemakzulan menjadi tidak berarti. Ini sudah berakhir," kata Jeon. "Jika Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang aneh, kami akan menggunakan hak rakyat untuk melawan dan menyingkirkan mereka dalam sekali tebas."

Pada Sabtu (8/3/2025), Yoon dibebaskan dari pusat penahanan tempat ia ditahan sejak pertengahan Januari atas usahanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada Desember lalu. Pengadilan memutuskan bahwa penahanannya tidak sah.

Meski tidak lagi ditahan secara fisik, Yoon masih harus menjalani persidangan atas tuduhan memimpin pemberontakan dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulannya apakah akan dikukuhkan atau dibatalkan.

Kelompok sipil konservatif Angry Blue dijadwalkan menggelar aksi terpisah menentang pemakzulan Yoon di Paviliun Bosingak pada pukul 13.00 waktu setempat sebelum berbaris di sepanjang Jalan Jongno 3-ga.

Di sisi lain, kelompok aktivis yang menyerukan pemecatan segera Yoon menggelar aksi semalam di luar Istana Gyeongbok, Seoul. Pada Minggu pagi, mereka mengadakan konferensi pers di kompleks pemerintahan terdekat untuk mengumumkan "aksi darurat" selama sepekan guna mendesak pemecatan Yoon.

Pada pukul 14.00, kelompok tersebut akan memulai aksi unjuk rasa dari Museum Istana Nasional dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 100.000 orang, yang menyebabkan



Massa berbaris di bawah hujan deras untuk memprotes Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, saat aksi mogok dan protes terus berlangsung di tengah krisis darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, pada 5 Desember 2024. (Anadolu)

penutupan sebagian jalan di sekitar lokasi.

Kemudian pada pukul 19.00, aksi lainnya dijadwalkan berlangsung di Gwanghwamun.

Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Demokrat, menuntut Jaksa Agung Shim Woo-jung segera mengundurkan diri karena dianggap bertanggung jawab atas keputusan kejaksaan yang membebaskan Yoon setelah putusan pengadilan.

Partai Demokrat mengancam akan mempertimbangkan semua langkah hukum, termasuk pemakzulan Shim, jika ia menolak mundur.

"Partai Demokrat akan segera mengajukan tuntutan terhadap Jaksa Agung Shim Woo-jung," ujar pemimpin fraksi Park Chan-dae usai pertemuan darurat anggota parlemen.

"Jaksa Agung Shim membebaskan Yoon Suk Yeol, dalam pemberontakan, setelah secara sukarela melepas kesempatan untuk segera mengajukan banding atas keputusan pengadilan dan mendapatkan penilaian dari pengadilan yang lebih tinggi."

Di sisi lain, Partai berkuasa People Power Party semakin gencar mendesak Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pemakzulan Yoon dan mengembalikannya ke jabatan presiden.

"Mahkamah Konstitusi harus mengingat bahwa mereka akan menghadapi reaksi yang tak tertahankan jika terburu-buru mencopot presiden dari jabatannya, sementara di kemudian hari ia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pemberontakan," kata juru bicara partai tersebut.

Diketahui polisi Korea Selatan akan memperketat keamanan saat sidang putusan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Langkah ini diambil setelah Presiden Yoon dibebaskan dari

tahanan.

Dikutip dari Yonhap, Minggu (9/3/2025), hampir 1 dari 10 polisi di negara itu akan dikerahkan di Seoul pada hari putusan MK. Awalnya, polisi berencana untuk mengerahkan sekitar 12.000 polisi antihuru-hara dari 192 unit di pusat kota Seoul. Namun polisi m e m p e r t i m b a n g k a n u n t u k menambah jumlah tersebut setelah Presiden Yoon dibebaskan dari tahanan pada Sabtu (8/3/2025).

Menurut sumber, 12.000 polisi yang akan dikerahkan telah mencapai hampir 10 persen dari keseluruhan 130.000 personel polisi negara itu.

Berdasarkan rencana terbaru, polisi akan mengerahkan sekitar 5.000 petugas di Mahkamah Konstitusi dan di sekitar Lapangan Gwanghwamun sehari sebelum pengadilan menyampaikan putusannya. Selain itu sekitar 9.000 petugas akan dikerahkan pada hari putusan untuk membuat tempat-tempat tersebut tidak dapat diakses oleh para pengunjuk rasa.

Namun belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk putusan tersebut.








Mereka juga berencana untuk mengerahkan sekitar 40 unit polisi terpisah untuk menjaga tempat-tempat yang berisiko diserang oleh para pengunjuk rasa, termasuk kedutaan besar Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Rusia, Inggris, dan Kanada, kediaman hakim Mahkamah Konstitusi, dan kantor pusat partai politik besar.

"Kami tidak dapat memastikan bagaimana unjuk rasa di kedua belah pihak yang mendukung dan menentang pemakzulan akan berjalan," kata seorang pejabat polisi, seraya menambahkan bahwa ada ruang untuk rencana keamanan yang "diperkuat".

Perintah Penangkapan Dibatalkan

Pengadilan Korsel sebelumnya membatalkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif usai dimakzulkan parlemen. Putusan pengadilan ini memungkinkan pembebasan Yoon dari tahanan.

JEJAK PEMAKZULAN PRESIDEN KORSEL YOON SUK YEOL HINGGA DIBEBASKAN:

-  **3 Desember 2024:** Yoon Suk Yeol dituduh membuat kegaduhan setelah menetapkan darurat militer di Korea Selatan.
-  **14 Januari 2025:** Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk memutuskan pemakzulan Yoon, namun sidang itu ditunda karena Yoon tidak hadir.
-  **15 Januari 2025:** Yoon ditangkap di kediamannya setelah menolak panggilan sidang.
-  **20 Februari 2025:** Yoon menjalani sidang pidana terpisah terkait deklarasi darurat militer, yang menjadikannya presiden Korsel pertama yang diadili secara pidana saat masih menjabat.
-  **25 Februari 2025:** Sidang pemakzulan Yoon di Mahkamah Konstitusi selesai dengan 16 saksi memberikan kesaksian.
-  **7 Maret 2025:** Pengadilan membatalkan penangkapan Yoon atas dasar teknis dan hukum.
-  **8 Maret 2025:** Yoon dibebaskan dari tahanan setelah jaksa menyetujui pembebasannya, namun persidangan terhadapnya masih berlanjut

Putusan pengadilan ini, seperti dikutip dari AFP, Jumat (7/3/2025), menanggapi pengajuan tim pengacara Yoon yang meminta pengadilan membatalkan surat perintah penangkapan terhadap kliennya, yang dilaksanakan bulan lalu.

Dalam argumennya, tim pengacara Yoon menyebut penahanan kliennya tidak sah karena jaksa penuntut menunggu terlalu lama untuk mendakwanya.

"Wajar untuk menyimpulkan bahwa dakwaan diajukan setelah masa penahanan terdakwa berakhir," sebut dokumen Pengadilan Distrik Pusat Seoul.

"Untuk memastikan kejelasan prosedural dan menghilangkan keraguan mengenai legalitas proses investigasi, akan tepat untuk mengeluarkan keputusan untuk membatalkan penahanan," imbuh dokumen pengadilan tersebut.

Yoon yang mantan jaksa ini menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan pada Desember lalu, dengan secara tiba-tiba menetapkan darurat militer yang menanggukuhkan pemerintahan sipil untuk sementara dan mengirimkan tentara ke gedung parlemen.

Dia didakwa melakukan pemberontakan atas penetapan darurat militer yang berlangsung singkat tersebut. (Yonhap, AFP, ist/nei)



Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol menyapa para pendukungnya setelah keluar dari pusat penahanan di Uiwang, Korea Selatan, Sabtu (8/3/2025). (Yonhap)

GERD Saat Puasa? Ini Cara Atasinya!



BAGI penderita GERD, puasa dapat menjadi tantangan yang signifikan karena perubahan pola makan dan tidur dapat memicu gejala-gejala yang tidak nyaman, seperti maag, sakit perut, dan gangguan pencernaan lainnya.

Namun, dengan manajemen yang tepat, puasa dapat dijalani dengan nyaman tanpa menyebabkan kekambuhan GERD. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menghindari kambuhnya GERD selama puasa.

Karena itu, sangat penting bagi penderita GERD untuk memahami dan menghindari berbagai pemicu yang bisa memperburuk kondisi mereka saat berpuasa. Lalu, apa saja yang memicu GERD?

Makanan Pedas dan Asam

Makanan pedas dan asam dapat menjadi pemicu utama bagi penderita GERD. Bahan-bahan seperti cabai, tomat, dan rempah-rempah yang sering digunakan dalam hidangan buka puasa dapat merangsang produksi asam lambung berlebihan.

Makanan-makanan ini bisa mengiritasi saluran pencernaan dan melemahkan katup yang mencegah asam lambung naik ke kerongkongan, yang akhirnya memperburuk gejala GERD.

Oleh karena itu, penting untuk memilih makanan yang lebih ringan dan tidak asam atau pedas, seperti sup sayuran atau hidangan berbahan dasar kentang.

Makanan Berlemak dan Gorengan

Makanan berlemak dapat membuat orang merasa lesu. Dilansir dari Cleveland Clinic, makanan berlemak dan gorengan juga memerlukan waktu yang lebih lama untuk dicerna tubuh dan dapat menyebabkan perut

terasa penuh dan kembung. Ini akan meningkatkan tekanan pada katup antara perut dan kerongkongan, yang mempermudah asam lambung naik ke esofagus.

Selain itu, makanan berlemak dapat merangsang produksi asam lambung lebih banyak. Untuk itu, penderita GERD sebaiknya menghindari makanan yang digoreng atau mengandung lemak tinggi. Pilihlah makanan yang lebih sehat yang dimasak dengan cara direbus atau dipanggang.

Makanan Berkalori Tinggi dan Berat

Makanan yang mengandung kalori tinggi dan sulit dicerna, seperti makanan cepat saji dan makanan berat, dapat memberikan tekanan berlebih pada sistem pencernaan. Ketika makan terlalu banyak, perut akan terasa penuh dan meningkatkan kemungkinan terjadinya refluks asam. Selain itu, makan dalam porsi besar sekaligus dapat memperburuk gejala GERD.

Sebaiknya, penderita GERD menghindari makan berlebihan, dan memulai berbuka dengan makanan ringan seperti kurma dan air, sebelum melanjutkan ke makan utama secara bertahap. Minuman Berkafein dan Berkarbonasi Kafein yang terdapat dalam kopi, teh, dan soda dapat merangsang

produksi asam lambung berlebihan, yang memperburuk gejala GERD. Selain itu, minuman berkarbonasi bisa menyebabkan perut kembung karena gas yang terperangkap, yang meningkatkan tekanan dalam perut dan dapat memicu refluks asam.

Karena itu, penderita GERD sebaiknya menghindari minuman yang mengandung kafein atau karbonasi.

Sebagai alternatif, minumlah air putih, jus buah yang tidak terlalu asam, atau teh herbal yang lebih ramah bagi perut.

Tidur Setelah Makan

Dikutip dari web Universitas Airlangga, dosen Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Ilmu Kesehatan Unair, Kurnia Alisaputri, menyebutkan perubahan jadwal tidur juga dapat menyebabkan stres.

Tidur setelah makan menjadi kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, terutama setelah berbuka puasa. Namun, bagi penderita GERD, kebiasaan ini dapat memperburuk kondisi mereka. Ketika tidur, gravitasi tidak dapat membantu menahan asam lambung di dalam perut, sehingga asam bisa naik ke kerongkongan dan menyebabkan maag.

Karena itu, disarankan untuk menunggu setidaknya dua hingga tiga jam setelah makan sebelum tidur. Jika tidur tidak dapat dihindari segera setelah makan, posisi tidur dengan kepala yang lebih tinggi bisa membantu mencegah refluks asam. Selain itu, jika tidak ada kewajiban untuk begadang, sebaiknya segera beristirahat setelah salat Tarawih untuk memastikan tidur yang cukup.

Dehidrasi

Kekurangan cairan dalam tubuh dapat memperburuk gejala GERD. Dehidrasi bisa mengganggu proses pencernaan dan meningkatkan produksi asam lambung.

Selain itu, tubuh yang dehidrasi cenderung merespons dengan produksi asam lambung yang lebih tinggi.

Karena itu, sangat penting untuk tetap

terhidrasi dengan cukup selama berpuasa. Penderita GERD harus berusaha minum air putih setidaknya dua hingga tiga liter sehari, dengan membaginya antara waktu sahur dan berbuka. Hindari minuman berkafein dan berkarbonasi yang bisa menyebabkan dehidrasi.

Faktor Pemicu Maag dan GERD saat Puasa

Meskipun puasa dapat membantu memperbaiki kondisi maag, pola makan yang tidak tepat saat sahur dan berbuka justru dapat memperburuk kondisi ini.

Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, pedas, atau gorengan dapat meningkatkan produksi asam lambung dan memicu kambuhnya maag serta GERD.

Dr. Firhat menjelaskan bahwa ketika seseorang mengonsumsi makanan pemicu maag dalam jumlah banyak sekaligus, lambung akan menerima semua pemicu tersebut dalam waktu yang bersamaan. Hal inilah yang menyebabkan maag sering kambuh saat puasa.

Menghindari pemicu GERD saat menjalani ibadah puasa merupakan langkah yang sangat penting guna menjaga kenyamanan serta kesehatan sistem pencernaan selama bulan Ramadan.

Dengan memperhatikan pilihan makanan yang dikonsumsi, memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik, serta menghindari kebiasaan yang dapat memicu naiknya asam lambung, seperti langsung berbaring atau tidur setelah makan, penderita GERD dapat menjalani puasa dengan lebih nyaman tanpa khawatir gejala akan memburuk.

Selain itu, mengatur pola makan dengan baik, seperti menghindari makanan yang terlalu pedas, asam, atau berlemak, serta makan dalam porsi kecil namun sering, juga dapat membantu mengurangi risiko kambuhnya GERD.

Apabila gejala GERD tetap muncul atau bahkan semakin parah meskipun sudah berusaha menghindari pemicunya,

sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. (nei,ist/dya)



Samsung Galaxy A56, Alternatif Galaxy S25 versi Murah?

SAMSUNG, raksasa teknologi asal Korea Selatan, meluncurkan Samsung Galaxy A56 yang menawarkan desain mewah seperti flagship, fitur kecerdasan buatan (AI) yang canggih, dan harga yang lebih terjangkau, sekitar setengah dari harga seri Samsung Galaxy S25.

Samsung Galaxy A56 merupakan penerus dari model Galaxy A55. Samsung Galaxy A56 mengalami peningkatan dari sisi layar yang lebih terang (1.200 nits), desain lebih ringan, serta fitur AI "Awesome Intelligence".

Galaxy A56 juga mengusung desain kamera pill-shaped hitam yang membedakannya dari model A55. Bingkai aluminium datar dengan tombol power/volume yang lebih menonjol memberi kesan premium, terutama pada varian warna Awesome Lightgrey (putih).

Smartphone ini memiliki layar 6,7 inci FHD+ atau setara setara Galaxy S25 Plus, dengan kecerahan puncak 1.900 nits—cukup untuk penggunaan di bawah terik matahari.

Beberapa keunggulan smartphone ini antara lain fitur Awesome Intelligence, sebuah fitur paket AI yang terdiri dari lingkaran untuk pencarian, penghapus objek, dan pemangkasan Otomatis untuk edit video instan.

Smartphone ini juga dibekali dengan One UI 7, sistem operasi terbaru dengan fitur Now Bar dan kustomisasi home screen serta pembaruan OS dan keamanan garansi 6 tahun—sama seperti seri S25.

Dari sisi pengisian daya, Samsung A56 mengungguli Galaxy S25 biasa yang masih 25W. Dengan baterai 5.000mAh, ponsel ini bisa isi daya 50% dalam 30 menit. Sayangnya, tak ada wireless charging.

Selain pengisian daya wireless, kelemahan lainnya adalah Samsung Galaxy A56 dibekali dengan Chipset Exynos 1580 yang cocok untuk aktivitas harian, tetapi kurang nyaman untuk game berat.

Kemudian, bezel layar smartphone juga lebih tebal dibanding flagship. Untuk kamera, tidak ada peningkatan yaitu Kamera ultra-wide 12MP dan macro 5MP masih sama seperti A55.

Duet Galaxy A56 5G dan Galaxy A36 5G

Sementara itu, PhoneArena menyebut Samsung Galaxy A56 5G dan Galaxy A36 5G akan menjadi pesaing senjata andalan Samsung dalam mengincar pasar ponsel pintar yang terjangkau. Meskipun kedua perangkat memiliki beberapa kesamaan—seperti layar 6,7 inci,

perlindungan Gorilla Glass, dan baterai 5.000 mAh—ada beberapa perbedaan utama dan rumit yang membedakannya.

A56 5G memiliki rangka aluminium yang lebih premium, chipset yang sedikit lebih bertenaga, dan pengisian daya kabel 45W yang lebih cepat. Ponsel ini juga tampaknya memiliki keunggulan di bagian kamera, dengan kamera depan dan ultra-lebar beresolusi lebih tinggi dibandingkan dengan A36 5G.

Sementara itu, A36 5G tetap menggunakan rangka plastik dan perangkat keras yang sedikit lebih murah, tetapi tetap bisa menjadi pilihan yang bagus bagi pembeli yang sadar anggaran.

Harga Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 5G dijual

dengan empat varian warna yakni Awesome Olive, Awesome Graphite, Awesome Pink, Awesome Light Gray.

HP ini juga dijual dengan berbagai varian RAM + internal sebagai berikut:

-8/128 GB: **Rp 6.199.000**

-8/256 GB: **Rp 6.699.000**

-12/256 GB: **Rp 7.199.000**

Samsung Indonesia menyediakan benefit bernama Reservation+. Pengguna dapat memesan Galaxy A56 dan Galaxy A36 hanya dengan deposit Rp 100.000. Di sini pengguna akan mendapatkan keuntungan berupa potongan Rp 300.000 (sudah termasuk deposit) saat check-out perangkat nantinya. (nei,ist/dya)



HARIAN **LENTERA**
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tips Atasi Jerawat Hormonal Secara Alami

PADA saat menjelang atau selama menstruasi, banyak perempuan mengalami munculnya jerawat di wajah. Jerawat ini termasuk dalam kategori jerawat hormonal karena dipicu oleh perubahan hormon yang terjadi selama menstruasi.

Mengutip Cleveland Clinic, saat tubuh mengalami perubahan hormon, produksi sebum atau minyak di kulit cenderung meningkat. Nah, sebum yang berlebihan dapat menyumbat pori-pori dan memicu jerawat.

Jerawat hormonal memang sulit dicegah sebab tubuh perempuan akan selalu mengalami siklus menstruasi sebelum menopause. Tapi tenang saja, karena kondisi ini bisa kamu atasi sendiri di rumah. Bagaimana caranya?

Cara Mengatasi Jerawat Hormonal

Mengatasi jerawat hormonal bisa kamu coba di rumah menggunakan cara-cara yang dirangkum dari Healthline dan Health berikut:

Gunakan tea tree oil

Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tea tree oil dapat membantu mengurangi, mengelola, dan mencegah beberapa jenis jerawat, terutama jerawat vulgaris yang disebabkan oleh bakteri.

Itu karena tea tree oil memiliki efek anti bakteri. Selain itu, kandungan ini juga dapat membantu mengurangi stres oksidatif yang bisa menyebabkan jerawat hormonal. Kamu dapat menemukan kandungan tea tree oil dalam berbagai produk skin care,

seperti toner dan serum.

Cari skincare dengan kandungan alpha hydroxy acid

Alpha hydroxy acids (AHA) adalah asam dari beberapa jenis tanaman, salah satunya jeruk. Kandungan ini telah lama dikenal sebagai obat untuk menghilangkan sel kulit mati berlebih. Perlu diketahui, sel kulit mati yang menumpuk di kulit juga dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Oleh karena itu, penting untuk membersihkannya agar kulit senantiasa sehat.

AHA dapat dengan mudah ditemukan dalam produk skin care, seperti serum, toner, dan pencuci wajah. Namun, perlu dicatat bahwa kandungan ini dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari. Jadi, jangan lupa memakai sunscreen dengan rutin, ya.

Gunakan the hijau

Teh hijau atau green tea dapat membantu mengurangi peradangan jerawat dan memudahkan bekasnya. Jadi, carilah skin care dengan kandungan tanaman alami ini.

Kamu juga bisa mendapatkan manfaat teh hijau untuk kulit dengan meminumnya setiap hari. Hanya saja, penelitian tentang manfaat minum teh hijau terhadap jerawat masih sangat minim.

Bergerak lebih banyak

Selain mengandalkan skin care,

kamu juga bisa menghilangkan jerawat hormonal dengan aktivitas fisik teratur. Itu karena olahraga dapat meningkatkan sirkulasi, sehingga kulit mendapatkan oksigen yang cukup dan peradangan jerawatmu bisa berkurang.

Berkeringat juga terbukti dapat membuka pori-pori. Jadi, setelah berolahraga, cucilah wajah dengan bersih agar seluruh kotoran menghilang hingga ke pori-pori.

Sesuaikan pola makan

Susu sapi mengandung banyak hormon yang dapat menyebabkan kulit berjerawat. Oleh karena itu, disarankan mengganti susu sapi dengan susu almond.

Selain itu, batasi asupan makanan dengan indeks glikemik (IG) tinggi seperti roti, nasi, dan pasta. Sebab, makanan tersebut dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan jerawat.

Konsumsi Makanan Bergizi

Peningkatan hormon erat kaitannya dengan jenis makanan yang dikonsumsi. Sebagai contoh, junk food yang dikenal tinggi lemak jenuh, kalori, gula, dan garam menjadi penyumbang utama peningkatan produksi sebum pada kulit yang nantinya dapat berkontribusi pada penyumbatan pori-pori dan peradangan.

Untuk itu, mulai atur pola makan bergizi yang bermanfaat untuk menyeimbangkan hormon dan meningkatkan kesehatan kulit secara keseluruhan. Fokuslah pada makanan

yang kaya akan nutrisi, seperti buah dan sayuran segar, makanan tinggi serat, asam lemak omega-3, dan protein tanpa lemak.

Mengelola Stres dengan Meditasi atau Olahraga

Meditasi dapat membantu menyeimbangkan hormon sehingga berdampak positif pada penampilan kulit dengan mengatasi penyebab stres yang menyebabkan timbulnya jerawat. Selain permasalahan jerawat, meditasi disebut bermanfaat menangani banyak masalah kulit umum lainnya seperti penuaan dini, kantung mata, dan kemerahan.

Jadwal Tidur yang Teratur

Kualitas tidur malam yang teratur dan nyenyak membantu membatasi produksi kortisol di siang hari yang dikenal sebagai hormon stres. Sebaliknya, kurang tidur dapat menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak kortisol. Terlalu banyak kortisol dapat memengaruhi penampilan kulit Anda dengan berbagai cara. Bukan hanya munculnya jerawat, kekeringan, dan rusaknya kolagen juga menjadi risikonya.

Penyebab Jerawat Hormonal

Jerawat hormonal secara alami muncul akibat perubahan hormon, terutama hormon androgen seperti testosteron dan dihidrotestosteron (DHT). Perubahan ini meningkatkan produksi minyak di kulit. *nei,ist/dya*

Tipu-tipu Volume ... (dari Hal 1)

POLISI menyita MinyakKita buatan tiga produsen yang jumlah volumenya tak sesuai label. Berdasarkan pengukuran, volume minyak hanya berisikan 700-900 mililiter, padahal pada label tertera 1 liter.

"Bahwa telah ditemukan minyak goreng merek MinyakKita yang secara langsung dilakukan pengukuran, tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan," kata Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

Helfi pun mengungkap produsen tiga merek MinyakKita tersebut. Pertama, MinyakKita produksi PT Artha Eka Global Asia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

Kedua, MinyakKita produksi koperasi produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah. Ketiga, MinyakKita kemasan pouch ukuran 2 liter produksi PT Tunas Agro Indolestari, Tangerang, Banten.

Selain menyita barang bukti, Helfi mengatakan pihaknya juga telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas temuan tersebut.

"Atas temuan dugaan ketidaksesuaian antara label kemasan dan isi tersebut telah dilakukan langkah-langkah berupa penyitaan barang bukti dan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng dengan merek MinyakKita yang dikemas di bawah ketentuan yang seharusnya berisi 1 liter. Amran menemukan pelanggaran itu saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

"Volumenya (MinyakKita) tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan bahan pokok meningkat," ujar Amran dalam keterangannya.

Menurut Amran MinyakKita yang ia temukan itu diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

Selain volume yang tidak sesuai, Amran memastikan MinyakKita itu dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Dari yang seharusnya Rp 15.700 per liter, minyak goreng rakyat itu dijual dengan harga Rp 18.000 per liter. Atas temuan itu, Amran menegaskan praktik curang tidak bisa ditoleransi dan tidak boleh terulang kembali. Ia mengklaim kecurangan

yang dilakukan oleh tiga produsen MinyakKita telah dilaporkan ke Satgas Tugas Pangan dan Bareskrim Polri.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut," kata Amran mengancam.

Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi dan kepatuhan pada HET MinyakKita. "Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat," ucap Amran melanjutkan.

Ia juga memanti-wanti produsen dan distributor agar tidak bermain curang dengan MinyakKita. Sebaliknya ia mendorong para pengusaha untuk mentaati regulasi yang berlaku. Amran mengungkap pemerintah akan rutin melakukan sidang demi memastikan kesesuaian harga dan isi dari MinyakKita yang beredar di pasaran.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan sudah tidak ada MinyakKita yang isinya berada di bawah ketentuan 1 liter. Hal itu merupakan respon Budi usai mendengar informasi MinyakKita hanya berisi 750 mililiter dari video yang diunggah oleh akun Tiktok bernama @miepejuang pada Senin, (3/3/2025).

Menurut Budi peristiwa yang diabadikan baru-baru ini merupakan kasus lama yang pernah ditangani oleh pemerintah. "Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kita laporkan juga ke polisi," kata Budi saat konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/3/2025). Ia menjelaskan produsen yang berbuat curang itu merupakan pihak yang sama yang pernah disegel oleh Kemendag pada bulan Januari lalu.

"PT Navyta Nabati Indonesia, yang pernah kami datangi itu," ucapnya usai memastikan dengan memeriksa laporan di ponselnya. Budi menyebut saat ini polisi masih melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Navyta Nabati Indonesia.

Dengan adanya klarifikasi ini Budi menjamin sudah tak ada MinyakKita kemasan yang isinya di bawah 1 liter. "Yang (berisi 750 mili liter) sudah nggak beredar lagi," ucapnya. Sehingga ia tidak ingin masyarakat meragukan MinyakKita yang saat ini dijual di pasaran. "Yang lainnya normal, ya. Satu liter normal," kata Budi.

Rakyat Rugi Rp4.300/L

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai kasus ketidaksesuaian volume dalam kemasan MinyakKita

memberikan keuntungan besar bagi pemburu rente atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Huda menyebut, jika harga MinyakKita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, sementara volume yang hilang dalam setiap kemasan adalah 250 ml, maka masyarakat mengalami kerugian sekitar Rp3.925 per liter. Dengan harga rata-rata nasional yang lebih tinggi, yaitu Rp17.200 per liter, kerugian masyarakat bisa mencapai Rp4.300 per liter.

dengan kebutuhan minyak goreng mencapai 170 ribu ton per bulan, estimasi keuntungan yang didapatkan dari selisih volume ini berkisar antara Rp667,25 miliar hingga Rp731 miliar setiap bulan.

"Dengan kebutuhan mencapai 170 ribu ton per bulan, pemburu rente mendapatkan keuntungan sebesar Rp667,25 miliar-Rp731 miliar setiap bulannya," kata Huda, Minggu (9/3/2025).

Selain itu, ketidaksesuaian volume di kemasan MinyakKita ini tentu menjadi perhatian serius, karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

"Kasus ketidaksesuaian volume di kemasan MinyakKita merugikan masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka membutuhkan pasokan MinyakKita untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk penggunaan pribadi maupun usaha," ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya korupsi volume ini memaksa masyarakat untuk membeli lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga pengeluaran mereka meningkat tanpa mendapatkan nilai yang sesuai.

"Ketika ada ketidaksesuaian volume, maka mereka pasti membeli dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang seharusnya. Artinya, ada penghasilan yang mereka keluarkan lebih untuk membeli MinyakKita sesuai dengan kebutuhan. Padahal, penghasilan tersebut bisa digunakan untuk membeli barang kebutuhan lainnya," jelas Huda.

Oleh karena itu, Huda meminta agar Pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam seluruh rantai produksi dan distribusi MinyakKita. Hal ini juga berlaku untuk produk-produk lain di bawah kebijakan pemerintah, seperti BBM Pertamina dan Peralite.

"Pemerintah perlu pengawasan lebih ketat dalam produksi hingga distribusi produk-produk kebijakan. BBM Pertamina dan Peralite, hingga MinyakKita perlu pengawasan lebih ketat," ujarnya.

Adapun yang terpenting, pihak yang terlibat dalam praktik curang ini

harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami masyarakat akibat ketidaksesuaian volume MinyakKita.

Menurutnya, tanpa langkah tegas, kejadian serupa bisa terus berulang, merugikan masyarakat, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola kebutuhan dasar.

"Semua yang terlibat harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah WAJIB mengganti kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai konsumen," pungkasnya.

Terpisah, Pengamat Pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPPI), Khudori menanggapi soal harga tak sesuai HET (harga Ecer Tertinggi).

Khudori menduga hal ini terjadi karena biaya pokok produksi sudah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 15.700/liter.

Khudori menjelaskan harga bahan baku minyak goreng yakni crude palm oil (CPO) dalam negeri selama 6 bulan terakhir sekitar Rp15.000-16.000/kg. Harga bahan baku ini jauh lebih tinggi dari hitungan harga CPO yang ditetapkan pemerintah untuk bahan baku MinyakKita yakni Rp 13.400/kg.

"Ini baru menghitung bahan baku CPO, belum memperhitungkan biaya mengolah, biaya distribusi, dan margin keuntungan usaha," kata Khudori dalam keterangan resminya, Minggu (9/3/2025).

Jika ketiga komponen itu diperhitungkan, dapat dipastikan produsen akan mengalami kerugian mengingat produsen MinyakKita diharuskan menjual produk ke Distributor 1 (D1) maksimal sebesar Rp 13.500/liter.

"Pengusaha mana yang kuat jika terus merugi? Usaha mana yang sustain bila harus jual di bawah harga produksi," pungkas Khudori.

Untuk itu, Khudori melihat perlu ada koreksi kebijakan dalam merespon kenaikan bahan baku ini.

Pasalnya jika tidak dilakukan ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, produsen menjual MinyakKita sesuai HET tapi mengorbankan kualitas seperti mengurangi takaran isi produk.

Kedua, produsen tetap memproduksi MinyakKita sesuai kualitas tetapi menjual dengan harga di atas HET.

"Bahwa keduanya berisiko dan melanggar aturan, ya. Tapi kalau aturan yang ada tidak memungkinkan usaha eksis dan sustain tanpa melanggar aturan, yang patut disalahkan pengusaha atau pembuat regulasi? Atau keduanya?" tanyanya. (wid, rls, kum, kcm/dya)

Ada Permainan Harga LPG Non-subsidi, KPPU Selidiki

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai penyelidikan awal atas dugaan praktik monopoli dalam penjualan gas alam cair atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi di pasar midstream yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Deputi bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto mengatakan, penyelidikan tersebut berasal ditetapkan dalam rapat komisi pada 5 Maret lalu. Penyelidikan juga berasal dari kajian KPPU yang dilakukan sejak tahun lalu.

"KPPU menduga terdapat pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli terhadap penjualan LPG nonsubsidi di pasar midstream (atau pasar gas LPG bulk non PSO untuk dikemas ulang) dengan menjual harga yang tinggi dan menikmati keuntungan yang tinggi," ujar Taufik dalam siaran resminya, Minggu (9/3/2025).

Taufik mengatakan, harga LPG nonsubsidi yang tinggi tersebut pun diduga mengakibatkan banyak konsumen yang beralih menggunakan LPG subsidi 3kg atau 'LPG melon'.

Selain itu, KPPU tengah mendalami struktur pembentukan harga di sektor tersebut, khususnya dari hulu hingga hilir. Saat ini, menurutnya, penjualan LPG Subsidi sebagai Public Service Obligation (PSO) dilakukan oleh PT PPN, yang menguasai lebih dari 80 persen pasokan LPG dalam negeri dan LPG impor.

Tidak hanya itu, PT PPN juga menjual LPG yang nonsubsidi dengan merek dagang BrightGas. Perusahaan tersebut juga telah melakukan penjualan gas secara bulk ke perusahaan lainnya, yakni BlueGas dan PrimeGas, yang merupakan produsen LPG tabung Non Subsidi.

"Dalam penjualan tahun 2024, KPPU juga menemukan adanya keuntungan yang tinggi atau super normal profit dari penjualan LPG Non Subsidi sebesar 10 kali lipat dibandingkan laba penjualan LPG Subsidi, atau sekitar Rp 1,5 triliun," katanya.

Hal tersebut, kata Taufik, diduga telah melanggar Pasal 17 dalam Undang-undang No.5/1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pertamina Membantah

Secara terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Happy Wulansari membantah tuduhan KPPU terkait praktik monopoli penjualan gas LPG non subsidi tersebut.

"Dugaan monopolinya di mana ya," tutur Happy di Jakarta, Minggu



(Ilustrasi) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan praktik monopoli penjualan LPG Non-subsidi oleh Pertamina Patra Niaga. (Dok)

(9/3/2025).

Dia mengatakan bahwa PT PPN bukanlah pemain tunggal yang ada di pasar gas LPG non subsidi di Indonesia. Pasalnya, menurut Happy, masih ada badan usaha lain yang

memasarkan LPG non subsidi di Indonesia.

"Karena LPG non subsidi ada pesaing atau badan usaha lain yang memasarkan LPG non subsidi," ujarnya.(wid,rls,ist/dya)

Pertamina Diminta Pajang RON 90-92 di SPBU

TERKAIT dugaan BBM oplosan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginstruksikan Pertamina Patra Niaga untuk memajang contoh bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan RON 90 dan RON 92 di setiap SPBU.

Langkah ini diambil untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang perbedaan kedua jenis BBM tersebut.

"Tujuan kami meminta Pertamina untuk menampilkan contoh BBM ini di tiap SPBU adalah agar masyarakat dapat lebih memahami perbedaan antara RON 90 dan RON 92," ujar Bahlil saat melakukan kunjungan kerja di Fuel Terminal Baubau, Minggu (9/3/2025).

Bahlil memastikan bahwa BBM yang beredar di pasaran, khususnya di Kota Baubau, sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. RON 90 digunakan untuk Peralite, sementara RON 92 merupakan jenis Pertamax.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan bersama BPH Migas, Pertamina, dan Lemigas untuk memastikan bahwa kualitas kedua jenis BBM tersebut sesuai dengan standar, dan perbedaan kualitasnya bisa dilihat dengan jelas oleh masyarakat," jelas Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa RON 90 adalah BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah, sedangkan RON 92 dijual dengan harga pasartanpa subsidi.

"Artinya, jika harga minyak dunia naik, harga RON 92 juga akan mengikuti kenaikan tersebut. Namun, untuk RON 90, harga tetap mengikuti ketetapan dari Pertamina dan Pemerintah," terangnya.

Dengan langkah ini, Bahlil berharap masyarakat di Baubau dapat lebih bijak dalam memilih jenis BBM sesuai kebutuhan dan mampu memahami perbedaan antara produk yang disubsidi dan yang tidak.

"Jadi saya yakinkan ke masyarakat bahwa insya Allah tidak ada kekhawatiran terkait dengan kualitas BBM yang dijual di pasaran," pungkasnya.

Di sisi lain, Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) membantah pernyataan Jaksa Agung terkait pengoplosan atau blending bahan bakar minyak (BBM) bukan merupakan kebijakan Pertamina.

"Jadi jika ada narasi sekarang tidak ada blending atau pengoplosan menurut hemat kami itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Termasuk pernyataan kontroversi Jampidsus Febri Adriansyah yang menyatakan Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat, padahal belum banyak saksi-saksi penting diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejagung," ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

"Konon kabarnya beredar informasi di kalangan pengusaha migas bahwa pada sekitar tahun 2022 ada pertemuan di rumah

HARGA LPG NON-SUBSIDI SAAT INI (DI LUAR ONGKIR)

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

- LPG 5,5 kg: Rp 94.000
- LPG 12 kg: Rp 194.000

Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

- LPG 5,5 kg: Rp 97.000
- LPG 12 kg: Rp 202.000

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

- LPG 5,5 kg: Rp 90.000
- LPG 12 kg: Rp 192.000

Kalimantan Utara:

- LPG 5,5 kg: Rp 107.000
- LPG 12 kg: Rp 229.000

Maluku, Papua:

- LPG 5,5 kg: Rp 117.000
- LPG 12 kg: Rp 249.000.



Ricardo Galael antara Ahok dengan Boy Thohir diharapkan bisa membuka kotak pandora siapa otak pelaku di belakang 9 orang tersangka saat ini," tambahnya.

Lanjut dia, berdasarkan data dari salinan dokumen yang diperoleh diduga merupakan dokumen kontrak yang sudah diamandemen sejak 22 Agustus 2014 hingga November 2017 antara PT Orbit Terminal Merak (OTM) dengan Direktorat Pertamina Pemasaran dan Niaga (Persero) (PPN).

CERI menduga bahwa proses pengoplosan atau blending BBM masih dilakukan di Terminal BBM PT OTM hingga saat ini. Jika oplos dilarang dipastikan BBM Peralite dan lainnya akan mengalami kelangkaan di SPBU.

Oleh karena itu, Yusri secara tegas membantah pernyataan Jaksa Agung Sanitair Burhanudin ketika didampingi Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Kamis, 6 Maret 2025 di hadapan awak media yang telah menyatakan bahwa pekerjaan blending adalah aktivitas oknum bukan Pertamina secara korporasi. (wid,mol,ist/dya)